KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Lima Paket Isu RUU Pemilu Di-Voting di Paripurna
Tanggal : Jumat, 14 Juli 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 1 & 9

Lima Paket Isu RUU Pemilu Di-*voting* di Paripurna

● FAUZIAH MURSID,
DIAN ERIKA NUGRAHENY

JAKARTA – Lima paket isu krusial Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dipastikan akan diputuskan melalui *voting* dalam Rapat Paripurna DPR. Keputusan ini ditetapkan setelah Pansus RUU Pemilu dan pemerintah menyepakati akan membawa lima paket isu krusial pada rapat paripurna 20 Juli mendatang.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengungkapkan, kesepakatan itu didapat usai pansus dan pemerintah melakukan lobi setengah kamar dalam rapat kerja Pansus Pemilu pada Kamis (13/7) malam. "Namun, upaya-upaya untuk mencapai musyawarah mufakat tetap dilakukan sampai dengan rapat paripurna tanggal 20 Juli 2017," ujarnya di Ruangan Pansus B, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Lukman juga mengatakan, dari pandangan mini fraksi yang disampaikan hari ini juga setidaknya menggambarkan peta *voting* fraksi dalam rapat paripurna pada 20 Juli mendatang. Adapun pada Kamis (13/7) malam, Pansus RUU Pemilu dan pemerintah menyepakati pembahasan RUU Pemilu selesai. Hal ini ditandai dengan penandatanganan naskah RUU Pemilu antara pemerintah dan seluruh fraksi. Namun, naskah yang ditandatangani tersebut minus lima isu krusial, yaitu ambang batas presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, jumlah kursi per dapil, dan metode konversi suara.

Kelima paket isu yang dimaksud disusun berdasarkan lima isu krusial belum disepakati sampai Rapat Internalisasi Pansus RUU Pemilu, Rabu (12/7). Kelima paket tersebut adalah Paket A (*presidential threshold* 20-25 persen, *parliamentary threshold* empat persen, sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi 3-10 kursi, dan metode konversi suara saint lague murni). Paket B (*presidential threshold* nol persen, *parliamentary threshold* empat persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi 3-10 kursi, metode konversi suara kuota hare). Paket C (*presidential threshold* 10-15 persen, *parliamentary threshold* empat persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi 3-10 kursi, metode konversi suara quota hare). Paket D (*presidential threshold* 10-15 persen, *parliamentary threshold* lima persen, sistem pemilu terbuka, alokasi

Bersambung ke hlm 9 kol 4-6

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Lima Paket Isu RUU Pemilu Di-voting di Paripurna ..... *dari hlm 1*

kursi 3-8 kursi, metode konversi suara saint lague murni). Dan, Paket E (*presidential threshold* 20-25 persen, *parliamentary threshold* 3,5 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi 3-10 kursi, metode konversi suara kuota hare).

Sebelum disepakati, fraksi-fraksi di dalam Pansus RUU Pemilu terbelah dalam memilih paket opsi isu krusial RUU Pemilu. Lima fraksi koalisi partai pendukung pemerintah, yaitu Golkar, PDIP, Nasdem, PPP, dan Hanura kompak memilih Paket A. Dengan demikian, bila dihadapkan pada skenario *voting*, koalisi ini bisa memenangkan suara karena jumlah kursinya mencapai 290 kursi dari total 560 kursi anggota DPR.

Hal ini diketahui hingga rapat kerja pansus RUU Pemilu dengan pemerintah kembali ditunda pada pukul 18.00 WIB yang dilanjutkan dengan forum lobi. Sikap lima fraksi tersebut menunjukkan ada perubahan sikap. Sebelumnya, hanya tiga fraksi yang sudah jelas mendukung *presidential threshold* 20-25 persen sesuai opsi Paket A, yakni Golkar, PDIP, dan Nasdem.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masih berharap musyawarah mufakat terhadap lima paket isu krusial RUU Pemilu masih bisa tercapai sampai sebelum rapat paripurna.

Sebab, pemerintah sejak awal menghendaki pengambilan keputusan tidak melalui *voting* dalam rapat paripurna. "Kita juga menyampaikan sampai 20 lagi sebelum paripuna masih bisa dibuka rapat pansus kembali untuk menyepakati bersama hal-hal yang tadi masih ada perbedaan," ujar Tjahjo.

Pemerintah masih berharap poin *presidential threshold* disepakati sesuai kehendak pemerintah, yakni 20-25 persen. Sementara jika melalui *voting*, paripurna belum pasti paket yang terpilih adalah berisi poin *presidential threshold*.

Karena itu, pemerintah mengingatkan meskipun disepakati akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR, pemerintah masih membuka peluang kembali ke UU Pemilu lama. Meskipun pada Kamis (13/7), pemerintah dan seluruh fraksi telah menandatangani naskah pembahasan RUU Pemilu.

Lebih lanjut, menurut Tjahjo, pemerintah masih bisa menarik diri dari pembahasan dan meminta penundaan atas hasil dari Rapat Paripurna DPR tersebut. "Di paripurna itu bisa *loh* pemerintah, kalau Anda ingat zaman Pak Mardiyanto (mendagri era sebelumnya) masih bisa skors, ditunda dulu keputusannya, bisa batal," ujar Tjahjo.

Ditaati semua

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini meminta semua pihak harus taat dan menerima hasil *voting* dalam Rapat Paripurna DPR terkait RUU Pemilu. Permintaan ini disampaikan Titi selepas Pansus RUU Pemilu memutuskan membawa lima isu krusial dalam RUU tersebut ke rapat paripurna pekan depan. "Dengan begitu, benar-benar segera ada kepastian untuk mengakhiri kebuntuan dalam penyelesaian RUU Pemilu," ujar Titi ketika dihubungi *Republika* di Jakarta, Kamis (13/7) malam.

Titi menjelaskan, proses *voting* dalam rapat paripurna bersifat terbuka bagi publik. Dengan begitu, prosesnya akan diketahui oleh masyarakat luas. Sebelum *voting*, Perludem menyarankan agar pemerintah dan DPR melakukan sosialisasi draf RUU Pemilu kepada masyarakat. Hal itu bertujuan agar perkembangan terkini di DPR dapat dipantau oleh masyarakat.

Lebih lanjut Tuti mengingatkan ada rentang waktu kurang lebih sepakan hingga Rapat Paripurna DPR digelar pada 20 Juli. Itu artinya ada jeda waktu sebelum *voting* dilakukan."Kami tidak menyebut pasti ada barter atau kompromi politik menjelang *voting*. Hanya saja, sebaiknya tidak ada barter yang berujung kepada politik transaksional sebelum rapat paripurna. Kalaupun ada kompromi, disarankan tetap berada kepada koridor RUU Pemilu yang jujur, adil, demokratis, dan konstitusional," kata Tuti.

■ **ed:** muhammad iqbal